

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 903/HK.01.01/JT-31/07/2024

**TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN EVALUASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2024
MENUJU PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan, perlu ditetapkan Honorarium Narasumber dan Moderator Kegiatan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Menuju Pengawasan Partisipatif Pilkada Tahun 2024;
- c. Bahwa honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Atas Nama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
7. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Undangan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Nomor 891/HM.03.00/K.JT-31/07/2024 perihal Permohonan Narasumber an. Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.
12. Undangan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Nomor 891/HM.03.00/K.JT-31/07/2024 perihal Permohonan Moderator an. Aida Syafila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan Tentang Penetapan Honorarium Narasumber dan Moderator Kegiatan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Menuju Pengawasan Partisipatif Pilkada Tahun 2024;
- Pertama : Honorarium Narasumber dan Moderator Kegiatan Evaluasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Menuju Pengawasan Partisipatif Pilkada Tahun 2024 sebagai berikut:

Keterangan	Uraian	Jumlah
Narasumber Eksternal	1 Org x 2 Jam x Rp 900.000/OJ	Rp 1.800.000,-
Moderator Eksternal	1 Org x 1 kali x Rp 700.000/OJ	Rp 700.000,-
	Jumlah	Rp 2.500.000,-

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024; dan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 15 Juli 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
an. Kuasa Pengguna Anggaran




SOPAN WIJANTO, S.E., M.Si
NIP. 198305042010011013

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
3. Yang bersangkutan;